

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
PERWIRA TNI
(Studi Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023)**

Oleh :

Arya Andhika

E1A021053

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakkonsistenan penerapan sanksi dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota Perwira TNI, pada khususnya dalam Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023, di mana pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi. Permasalahan penelitian ini berfokus pada penerapan asas kepentingan militer terhadap anak buahnya dalam pertimbangan hukum hakim serta kedudukan Surat Telegram Panglima TNI dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh sesama anggota TNI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diterapkan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data penelitian dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan militer dalam putusan tersebut belum dilakukan secara optimal, karena pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal tanpa mengakomodasi kepentingan disiplin, moral, dan kehormatan militer. Selain itu, Surat Telegram Panglima TNI belum ditempatkan secara proporsional sebagai pertimbangan normatif tidak langsung. Penelitian ini menyarankan perlunya konsistensi hakim militer dalam menerapkan asas kepentingan militer serta mengintegrasikan kebijakan internal TNI sebagai dasar pertimbangan untuk memperkuat penegakan disiplin dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Asas Kepentingan Militer; Perzinahan; TNI*

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF MILITARY NECESSITY IN THE
CRIMINAL OFFENSE OF ADULTERY COMMITTED BY TNI COMMISSIONED
OFFICERS**

(A Study of Case Decision Number 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023)

By :

Arya Andhika

E1A021053

ABSTRACT

This research is motivated by the inconsistency in the imposition of sanctions in cases of adultery committed by commissioned officers of TNI, particularly in Case Decision Number 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023, in which the additional penalty of dismissal from military services was not imposed by the Panel of Judges of the High Military Court. The research focuses on the application of the principle of military necessity in judicial considerations and the legal standing of the Commander of the TNI's Telegram Letter in cases of adultery committed among TNI members. This study employs a normative juridical research method, implemented through statutory approach, case approach, and analytical approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research data were collected through library research and analyzed using qualitative normative method. The research shows that the application of the principle of military necessity in the decision has not been carried out optimally, as the judges' considerations emphasize formal juridical aspects without sufficiently accommodating military discipline, moral values, and institutional honor. In addition, the Commander of the TNI's Telegram Letter has not been positioned proportionally as an indirect normative consideration. This research suggests the need for greater consistency among military judges in applying the principle of military necessity and for integrating internal TNI policies into judicial considerations in order to strengthen disciplinary enforcement and legal certainty.

Keywords: *Principle of Military Necessity; Adultery; Indonesian National Armed Forces (TNI).*